

STRATEGI PEMERINTAH PROVINSI RIAU DALAM PENINGKATAN PENJAMINAN KREDIT MELALUI PT. JAMKRIDA RIAU TAHUN 2018

Oleh: Fidelis

Email: fidelispakpahan.98@gmail.com

Pembimbing: Rury Febrina, S.IP, M.Si.

E-mail: rury_febrina@yahoo.com

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax: 076163277

ABSTRAK

PT. Jamkrida Riau meraih penghargaan TOP BUMD 2018 kategori TOP Jamkrida 2018 dan TOP Pembina (BUMD) 2018 yang diselenggarakan oleh Business News di Jakarta. PT. Jamkrida Riau mengalami pertumbuhan jumlah terjamin, nilai penjaminan dan perolehan IJP. Namun, tahun 2013-2020 PT Jamkrida Riau tidak ada lagi penambahan modal dari Pemerintah Provinsi Riau sehingga mempengaruhi PT. Jamkrida Riau melakukan usahanya.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Strategi Pemerintah Provinsi Riau dalam peningkatan penjaminan kredit melalui PT. Jamkrida Riau tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini di Kantor PT. Jamkrida Riau Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Kantor Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Manusia (SDM) Provinsi Riau dan Kantor DPRD Provinsi Riau. Sumber data dalam penelitian ini yaitu informan dan dokumen. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif yang jenisnya deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada dua strategi yang digunakan Pemerintah Provinsi Riau dalam peningkatan penjaminan kredit melalui PT. Jamkrida Riau yaitu strategi agresif dan strategi difensif. Strategi agresif dilakukan dengan membuat program-program untuk mencapai keunggulan/prestasi yang ditargetkan seperti: Biro Ekonomi Provinsi Riau selaku Pembina BUMD mengajukan permohonan kepada DPRD Provinsi Riau untuk penambahan modal PT. Jamkrida Riau dan pembinaan kepengurusan PT. Jamkrida Riau. Selanjutnya, strategi difensif dilakukan dengan membuat program-program untuk mempertahankan kondisi keunggulan atau prestasi yang sudah dicapai seperti: Memfasilitasi untuk penilaian kesehatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, memfasilitasi PT. Jamkrida Riau untuk bekerjasama dengan pihak lain dan melakukan pengawasan.

Kata Kunci: Strategi, Pemerintah Provinsi Riau dan PT. Jamkrida Riau

STRATEGI PEMERINTAH PROVINSI RIAU DALAM PENINGKATAN PENJAMINAN KREDIT MELALUI PT. JAMKRIDA RIAU TAHUN 2018

Oleh: Fidelis

E-mail: fidelispakpahan.98@gmail.com

Pembimbing: Rury Febrina, S.IP, M.Si.

E-mail: rury_febrina@yahoo.com

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax: 076163277

ABSTRACT

PT. Jamkrida Riau won the TOP BUMD 2018 for the 2018 TOP Jamkrida category and the 2018 TOP Builder (BUMD) award which was organized by Business News in Jakarta. PT. Jamkrida Riau has experienced growth in the amount guaranteed, the value of the guarantee and the proceeds of the IJP. However, in 2013-2020 PT Jamkrida Riau no longer added capital from the Riau Provincial Government so that it affected PT. Jamkrida Riau is doing its business.

This study aims to describe the Riau Provincial Government's Strategy in increasing credit guarantee through PT. Jamkrida Riau in 2018. This research uses a qualitative approach. The location of this research is in the office of PT. Jamkrida Riau, Pekanbaru City, Riau Province, Office of the Administration for the Economy and Human Resources (HR) of Riau Province and the DPRD Office of Riau Province. Sources of data in this study are informants and documents. The data collection technique is done by interview and documentation. While the data analysis technique was carried out by using descriptive qualitative analysis.

The results of this study indicate that there are two strategies used by the Riau Provincial Government in increasing credit guarantee through PT. Jamkrida Riau is an aggressive strategy and a defensive strategy. The aggressive strategy is carried out by making programs to achieve targeted excellence / achievement, such as: the Riau Province Economic Bureau as the BUMD coach submits a request to the Riau Provincial DPRD for additional capital of PT. Jamkrida Riau and the management development of PT. Jamkrida Riau. Furthermore, a defensive strategy is carried out by making programs to maintain the condition of excellence or achievement that has been achieved, such as: Facilitating health assessments, improving the quality of human resources, facilitating PT. Jamkrida Riau to cooperate with other parties and conduct surveillance.

Keywords: Strategy, Riau Provincial Government and PT. Jamkrida Riau

A. PENDAHULUAN

1) Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 332 menjelaskan bahwa pendirian BUMD didasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk. Sumber modal BUMD terdiri dari penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya yang terdiri dari penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya yang terdiri dari kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Pasal 131 menjelaskan bahwa:

1. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan BUMD.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 133 menjelaskan bahwa pejabat pada pemerintah daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas melakukan:

- a. Pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
- b. Pembinaan kepengurusan;

- c. Pembinaan pendayagunaan aset;
- d. Pembinaan pengembangan bisnis;
- e. Monitoring dan evaluasi;
- f. Administrasi pembinaan; dan
- g. Fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Riau pasal 10 ayat 3 menjelaskan bahwa pemegang saham adalah Pemerintah Daerah Provinsi Riau. Pasal 28 menjelaskan bahwa tujuan dilaksanakannya pembinaan BUMD adalah:

- a. Menjadikan BUMD yang dikelola secara profesional yang mampu tumbuh berkembang dan memiliki daya saing
- b. Meningkatkan kontribusi BUMD dalam Pendapatan Asli Daerah
- c. Meningkatkan fungsi kontrol dan pengendalian terhadap BUMD; dan
- d. Mendorong BUMD untuk menciptakan iklim usaha yang sehat.

PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Riau atau yang disingkat dengan PT. Jamkrida Riau ini merupakan kelanjutan dari PT. Sarana Penjaminan Riau, adalah perusahaan penjaminan kredit yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Riau. Lahirnya PT Jamkrida Riau tersebut merupakan upaya nyata Pemerintah Provinsi Riau dalam membantu Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) mendapatkan kemudahan akses kredit. Sesuai Pasal 3 ayat 2 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2013 tentang PT. Jamkrida menjelaskan tujuan pembentukan PT. Jamkrida Riau adalah :

- a. Memberikan jasa penjaminan pembiayaan kepada usaha mikro,kecil,menengah dan koperasi.

- b. Meningkatkan kegiatan ekonomi kerakyatan Provinsi Riau; dan
- c. Meningkatkan sumber pendapatan asli daerah.

Selama beroperasi PT. Jamkrida Riau mendapat penghargaan kategori TOP Jamkrida bidang penjaminan KUR (Kredit Usaha Rakyat) dalam Acara TOP BUMD di tahun 2017. Selain itu, PT. Jamkrida Riau mengalami pertumbuhan jumlah terjamin, nilai penjaminan dan perolehan IJP.

Berikut penjelasan datanya:

Tabel 1.

Data Jumlah Terjamin, Nilai Penjaminan dan Perolehan IJP Tahun 2016-2018

Tahun	UMKM/Terjamin	Nilai Penjaminan	Perolehan IJP
2016	3.164	Rp. 225.369.339.561	Rp. 6.952.652.921
2017	4.530	Rp. 299.771.840.107	Rp. 10.347.273.625
2018	8.045	Rp. 955.221.563.966	Rp. 28.908.574.919

(Sumber Data: Kantor PT. Jamkrida Riau)

Berdasarkan data diatas, selama empat tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah terjamin, kenaikan jumlah terjamin diatas berimbang positif pada sisi-sisi yang lainnya. Laporan Tahunan PT. Jamkrida Riau menjelaskan bahwa penerima jaminan itu ialah: Bank Riau Kepri, Sarana Riau Ventura, Bank Yudha Bhakti, BPR Unisritama, Kopkar BRK, PT PER, KUR, dll.

Beberapa masalah atau kendala dalam pencapaian penjaminan kredit di PT. Jamkrida Riau adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya modal usaha yang dimiliki PT. Jamkrida Riau hingga saat ini Berikut penjelasan data penyertaan modal di PT. Jamkrida Riau.

Tabel 2
Data Penyertaan Modal PT. Jamkrida Riau

Tahun	Penyertaan Modal (Rp)
2004	Rp. 3.000.000.000
2005	Rp. 59.000.000
2006	Rp. 86.000.000
2007	Rp. 165.000.000 Rp. 2.750.000.000
2008	Rp. 110.000.000
2009	Rp. 293.000.000
2010	-
2011	Rp. 10.000.000.000
2012	Rp. 9.000.000.000
Jumlah	Rp. 25.463.000.000

(Sumber Data: Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber daya alam Pemerintah Provinsi Riau)

Berdasarkan data diatas menjelaskan bahwa modal pertama pada tahun 2004 sampai pada tahun 2012.

Tabel 3
Data Komposisi Pemegang Saham Perseroan

NO	Pemegang Saham	Penyertaan Modal (Rp)
1.	Pemerintah Provinsi Riau	Rp. 25.463.000.000
2.	PT. Pengembangan Investasi Riau	Rp. 293.000.000
3.	PT. Sarana Riau Venture	Rp. 58.000.000
Jumlah		Rp. 25.814.000.000

(Sumber Data: Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber daya alam Pemerintah Provinsi Riau)

Modal usaha itu masih belum memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan

oleh OJK dimana berdasarkan ketentuan OJK Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin Bab IX Ekuitas, pasal 31 ayat (2): Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah lingkup Provinsi wajib memiliki ekuitas paling sedikit Rp. 50.000.000.000 (Lima puluh miliar rupiah) dalam jangka waktu paling lama 5 tahun setelah memperoleh izin usaha (PT. Jamkrida Riau memperoleh izin usaha sejak 1 Agustus 2012).

2. Salah satu strategi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Riau terhadap PT. Jamkrida Riau dalam peningkatan penjaminan kredit ialah melakukan pembinaan keuangan terhadap PT. Jamkrida Riau. Akan tetapi, selama PT. Jamkrida Riau berproses, pembinaan keuangan yang dilakukan pemerintah Provinsi Riau terhadap PT. Jamkrida Riau masih lemah bisa dilihat dari penyertaan modal yang diberikan Pemerintah Provinsi Riau terhadap PT. Jamkrida Riau dari tahun 2004-2012 sebanyak Rp. 25.463.000.000 dan tahun 2013-2020 PT Jamkrida Riau tidak ada lagi penambahan modal dari Pemerintah Provinsi Riau sehingga mempengaruhi PT. Jamkrida Riau melakukan usahanya.

Sehingga dari permasalahan diatas, peneliti ingin meneliti mengenai **“Strategi Pemerintah Provinsi Riau dalam Peningkatan Penjaminan Kredit melalui PT. Jamkrida Riau Tahun 2018”**.

2) Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana strategi Pemerintah Provinsi Riau dalam peningkatan

penjaminan kredit melalui PT. Jamkrida Riau tahun 2018 ?

2. Apa faktor yang mempengaruhi strategi Pemerintah Provinsi Riau dalam peningkatan penjaminan kredit melalui PT. Jamkrida Riau tahun 2018 ?

3) Tinjauan Pustaka

a. Studi Terdahulu

Penulisan penelitian terdahulu ini adalah hasil dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan berguna sebagai bahan perbandingan dan kajian penulis. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai perbandingan oleh penulis: Hasil penelitian dari Ambar Budhisulistiyawati, dkk yang berjudul tentang Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjelaskan bahwa terjadi tumpang tindih pengaturan sektoral tentang BUMD antara satu peraturan dengan peraturan yang lainnya, belum semua BUMD menerapkan sistem dan pengelolaan BUMD berdasarkan prinsip prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

4) Kerangka Teori

a. Strategi Pemerintah

Alfred D. Chandler, Jr dalam Stepen P. Robbins Strategi dapat didefinisikan sebagai penentuan dari tujuan dasar jangka panjang dan sasaran sebuah perusahaan, penerimaan dari serangkaian tindakan serta alokasi dari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk melaksanakan tujuan tersebut. Alfred D. Chandler, Jr dalam Stepen P. Robbins Strategi dapat didefinisikan sebagai penentuan dari tujuan dasar jangka panjang dan sasaran sebuah perusahaan, penerimaan dari serangkaian tindakan serta alokasi dari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk melaksanakan tujuan tersebut. Hadari Nawawi menjelaskan bahwa beberapa strategi hasil analisis dengan menggunakan teknik-teknik tersebut,

dalam usaha memilih dan menetapkan strateginya sebagai usaha mewujudkan visinya, adapun strategi yang dimaksud adalah:

1. Strategi Agresif
2. Strategi Konservatif
3. Strategi Difensif (Strategi Bertahan)
4. Strategi Kompetitif
5. Strategi Inovatif
6. Strategi Diversifikasi
7. Strategi Preventif

Kemudian Andrew juga mengatakan strategi adalah pola tujuan dan kebijakan yang menegaskan perusahaan dan bisnisnya. Sedangkan pemerintahan menurut Ermaya Suradinata adalah lembaga atau badan publik yang mempunyai fungsi dan tujuan negara, dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara. Jadi, dapat disimpulkan bahwa strategi pemerintah merupakan pola tujuan dan kebijakan yang disusun oleh pemerintah untuk mencapai tujuan negara.

b. Pembangunan Ekonomi

Schumpeter berpendapat bahwa penambahan pendapatan negara dari masa ke masa perkembangannya sangat tidak stabil dan keadaannya ditentukan oleh besarnya kemungkinan untuk menjalankan pembentukan modal yang menguntungkan para pelakunya. Pembangunan ekonomi menurutnya ditentukan oleh adanya inisiatif dari golongan pengusaha yang inovatif atau golongan entrepreneur, yaitu golongan masyarakat yang mengorganisir dan mengembangkan faktor lainnya untuk menciptakan barang-barang yang diperlukan oleh masyarakat.

Schumpeter juga membedakan antara pimpinan dan pemilik modal. Pimpinan perusahaan hanya memimpin kegiatan memproduksi dalam suasana struktur organisasi dan teknik memproduksi yang tidak berubah. Sedangkan pemilik modal adalah mereka yang menyediakan modal

untuk dapat digunakan oleh para pemimpin atau pengusaha untuk melakukan penyelidikan-penyelidikan menemukan dan mengembangkan inovasi.

5) Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis data kualitatif yaitu seluruh data diperoleh penulis baik dari wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan Penggunaan strategi deskriptif kualitatif dimulai dari analisis berbagai data yang terhimpun dari suatu penelitian, kemudian bergerak kearah pembentukan kesimpulan kategoris atau ciri-ciri umum tertentu.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Sekretaris Komisi III Bidang Perekonomian DPRD Provinsi Riau, Kepala Bagian Tata Kelola BUMD Provinsi Riau, Kepala Sub Bagian BUMD Aneka Usaha Pemerintah Provinsi Riau, Sub Bidang Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau, Kepala Divisi Umum & SDM PT. Jamkrida Riau, Kepala Divisi Teknis & Operasional PT. Jamkrida Riau, dan Satuan Pengawas Internal.

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Strategi Pemerintah Provinsi Riau dalam Peningkatan Penjaminan Kredit Melalui PT. Jamkrida Riau Tahun 2018

Dalam meningkatkan perekonomian nasional dan Provinsi Riau, Pemerintah menyusun strategi dalam peningkatan pendapatan daerah. Salah satu usaha untuk mendukung pertumbuhan perekonomian nasional ialah melalui usaha penjaminan. Salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki oleh Pemerintah

Provinsi Riau yang bekerja dalam usaha penjaminan ialah PT. Jamkrida Riau.

Penugasan yang diberikan Pemerintah Provinsi Riau kepada PT. Jamkrida Riau ialah salah satunya terdapat dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 10 Tahun 2013 tentang PT. Jamkrida Riau pasal 3 menjelaskan bahwa Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Riau sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah sebagai upaya membantu Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan dunia usaha guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau. Adapun yang menjadi tujuan pembentukan PT. Jainkrida Riau adalah;

- a. Memberikan jasa penjaminan pembiayaan kepada usaha mikro,kecil,menengah dan koperasi.
- b. Meningkatkan kegiatan ekonomi kerakyatan Provinsi Riau; dan
- c. Meningkatkan sumber pendapatan asli daerah.

Dalam melakukan peningkatan terhadap penjaminan kredit, ada beberapa strategi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Riau yaitu strategi agresif dan strategi difensif. Berikut penjelasan dari beberapa strategi Pemerintah terhadap peningkatan penjaminan kredit:

a. Strategi Agresif

PT. Jamkrida Riau mengalami kesulitan untuk menjalankan usahanya, maka Pemerintah selaku *owner* turun tangan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Upaya yang dilakukan oleh *owner* merupakan hal yang wajar sebab sudah menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Daerah untuk menjaga aset daerahnya. Berikut Peran dari Pemerintah Provinsi Riau

dalam peningkatan penjaminan kredit melalui PT. Jamkrida Riau, yaitu:

1. Penambahan Modal

Pemerintah Provinsi Riau dalam hal ini adalah DPRD Provinsi Riau sebagai unsur dari penyelenggaraan pemerintahan daerah memberikan penyertaan modal. Penyertaan modal disetor pertama kali kepada PT. Jamkrida Riau pada saat pendirian di tahun 2003. Modal disetor yang dimiliki perseroan per 31 Desember 2018 sama dengan tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 25.814.000.000, adapun perincian komposisi pemegang saham adalah sebagai berikut :

Tabel 4
Data Penambahan Modal PT.
Jamkrida Riau

N O	Pemegang Saham	Tahun 2017	Tambahan Modal	Tahun 2018
1.	Pemerintah Provinsi Riau	Rp. 25.463.000.000	0	Rp. 25.463.000.000
2.	PT. Pengembangan Investasi Riau	Rp. 293.000.000	0	Rp. 293.000.000
3.	PT. Sarana Riau Ventura	Rp. 58.000.000	0	Rp. 58.000.000
	Jumlah	Rp. 25.814.000.000	0	Rp. 25.814.000.000

(Sumber data: Laporan Tahunan PT. Jamkrida Tahun 2018)

Dari tabel diatas, bisa dilihat bahwa tahun 2018-2019 tidak ada penambahan penyertaan modal dari pemegang saham. Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Provinsi Riau Provinsi Riau dalam hal ini sebagai Pembina BUMD berusaha untuk mendorong DPRD Provinsi Riau agar menambahkan modal usaha kepada PT. Jamkrida Riau dengan

mengajukan permohonan untuk penambahan modal kepada PT. Jamkrida Riau.

2. Pembinaan Kepengurusan PT. Jamkrida Riau

Selain menyertakan modal, Pemerintah berperan dalam membina BUMD. Salah satu pembinaan yang dilakukan ialah membina kepengurusan BUMD. Bagi perusahaan, Sumber Daya Manusia (SDM) tidak hanya dipandang sebagai aset utama, tetapi merupakan modal penting dalam menunjang produktivitas kinerja perusahaan. Sejalan dengan hal ini, Pemerintah melakukan pemantauan terhadap kinerja kepengurusan karena dalam bersaing pun sangat membutuhkan orang-orang yang berkompeten dan professional.

b. Strategi Difensif

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Provinsi Riau Provinsi Riau yang sebagai Pembina Badan Usaha Milik Daerah, melakukan usaha seperti:

1. Memfasilitasi melalui Penilaian Kesehatan

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Provinsi Riau Provinsi Riau memfasilitasi PT. Jamkrida Riau melalui penilaian kesehatan BUMD secara rutin yaitu setiap tahun untuk mengetahui tingkat kesehatan BUMD ini.

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Tanpa adanya faktor manusia ini tentu organisasi tidak dapat berjalan dan berkembang. Peningkatan kualitas SDM ini merupakan salah satu bentuk pembinaan Biro Ekonomi Provinsi Riau. Dalam memperhatikan sumber daya manusianya perseroan telah menerapkan sistem pemberian insentif kepada karyawan. Berdasarkan Laporan Tahunan, Perseroan memberikan benefit kepada karyawan

berupa bonus sebagai bentuk apresiasi Perusahaan atas kinerjanya tahunannya.

3. Memfasilitasi sebuah kantor PT. Jamkrida Riau

Biro Ekonomi Provinsi Riau memfasilitasi PT. Jamkrida Riau dengan membangun sebuah kantor untuk PT. Jamkrida Riau dengan tujuan agar PT. Jamkrida dapat melakukan usahanya. Kantor PT. Jamkrida Riau ini secara resmi dibuka pada tanggal 07 Mei 2019 di Jalan Sumatera. Kantor ini dibuka langsung oleh Gubernur Riau Syamsuar, SekdaProv Riau Ahmad Hijazi, Direktur Utama PT. Jamkrida Riau Herman Boedoyo dan Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Provinsi Riau Darusman serta sejumlah pejabat bidang ekonomi lainnya.

4. Memfasilitasi dengan menjalin kerjasama dengan pihak lain

Usaha Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Provinsi Riau berikutnya untuk meningkatkan penjaminan kredit di tahun 2018 sampai saat ini, Biro Ekonomi Provinsi Riau memfasilitasi PT. Jamkrida Riau untuk menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan.

5. Melakukan Pengawasan Terhadap Kinerja Perusahaan

Biro Ekonomi Provinsi Riau melakukan pengawasan kepada PT. Jamkrida Riau dengan dibentuknya Dewan Komisaris. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Pasal 43 menjelaskan bahwa: Dewan Pengawas bertugas:

- a. Melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Perseroan Daerah; dan
- b. Mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah.

Dalam menjalankan pengawasannya, Dewan Komisaris wajib menyampaikan

hasil laporan pengawasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Pemerintah Provinsi Riau melakukan Evaluasi Kinerja Keuangan PT. Jamkrida Riau per tiga bulan sekali. Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya evaluasi ini ialah mau melihat apakah BUMD itu berjalan sesuai dengan fungsinya.

2) **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Strategi Pemerintah Provinsi Riau dalam Peningkatan Penjaminan Kredit Melalui PT. Jamkrida Riau Tahun 2018**

Ada dua faktor yang mempengaruhi strategi Pemerintah Provinsi Riau dalam peningkatan penjaminan kredit melalui PT. Jamkrida Riau di tahun 2018, yaitu:

1. Faktor Internal

Dalam menjalankan perannya sebagai Pembina di PT. Jamkrida Riau, ada beberapa hal yang menjadi penghambat Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Provinsi Riau dalam mendorong PT. Jamkrida Riau lebih unggul lagi yaitu DPRD Provinsi Riau yang belum memberikan modal kepada PT. Jamkrida Riau. Sehingga membuat PT. Jamkrida Riau belum mampu meningkatkan penjaminan kredit dan memberikan kontribusi terhadap Daerah. Selain itu, pemerintah juga tidak bisa masuk dalam pengelolaan bisnis di PT. Jamkrida Riau karena peran pemerintah hanyalah sebagai Pembina BUMD.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar. Adapun yang menjadi faktor eksternal nya adalah adanya persaingan dengan Perusahaan Milik Negara. Dalam menjalankan usahanya, PT. Jamkrida Riau menghadapi tantangan sehingga membuat sulit untuk mencapai keunggulan dalam usaha penjaminan karena

ada persaingan dengan salah satu Badan Usaha Milik Negara yaitu PT. Askrindo.

C. **PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Strategi Pemerintah Provinsi Riau dalam Meningkatkan Penjaminan Kredit Tahun 2018, dapat disimpulkan bahwa:

1) Ada dua strategi yang digunakan Pemerintah Provinsi Riau yaitu strategi agresif dan strategi defensif. Strategi agresif yaitu Biro Ekonomi Provinsi Riau selaku Pembina BUMD mengajukan permohonan kepada DPRD Provinsi Riau untuk penambahan modal PT. Jamkrida Riau, dan melakukan pemantauan dengan mendorong perusahaan untuk terus melakukan program pembinaan karyawan secara intensif. Dalam mempertahankan prestasi yang diraih PT. Jamkrida Riau, Biro Ekonomi Provinsi Riau yang sebagai Pembina Badan Usaha Milik Daerah, melakukan usaha seperti: memfasilitasi PT. Jamkrida Riau melalui penilaian kesehatan BUMD, mendorong Perusahaan untuk memperhatikan sumber daya manusianya dengan menerapkan sistem pemberian insentif kepada karyawan dan memberikan benefit kepada karyawan berupa bonus sebagai bentuk apresiasi Perusahaan atas kinerja tahunannya, memfasilitasi sebuah kantor buat PT. Jamkrida Riau, memfasilitasi PT. Jamkrida Riau untuk bekerjasama dengan pihak lain dan melakukan pengawasan dengan membentuk Dewan Komisaris.

2) Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi Pemerintah Provinsi Riau

dalam peningkatan penjaminan kredit melalui PT. Jamkrida Riau tahun 2018 yaitu terdiri atas dua faktor yaitu faktor internalnya seperti modal usaha sedangkan faktor eksternalnya seperti adanya pesaing dengan perusahaan milik negara.

2. Saran

Adapun saran terkait dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan tentang strategi Pemerintah Provinsi Riau dalam peningkatan penjaminan kredit melalui PT. Jamkrida Riau tahun 2018, yaitu:

1. Pemerintah Provinsi Riau khususnya DPRD Provinsi Riau lebih memperhatikan PT. Jamkrida Riau dengan menambahkan modal usaha PT. Jamkrida Riau karena modal merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan suatu usaha di sebuah organisasi. Selanjutnya, Pemerintah Provinsi membuat program pelatihan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya sehingga tidak hanya dari Perseroan saja dalam membuat program pelatihan melainkan Pemerintah juga turut hadir dalam mempersiapkan program pelatihan.
2. DPRD Provinsi Riau harus saling berkordinasi dengan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Provinsi Riau Provinsi Riau dalam melakukan peningkatan penjaminan kredit melalui PT. Jamkrida Riau untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Provinsi Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Bryson, John M. 2005. *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nawawi, H.Hadari. 2017. *Manajemen Strategik: Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan Dengan Ilustrasi di Bidang Pendidikan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurman. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Ruzikna. 2009. *Manajemen Perubahan*. Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau.
- Sutinah, Bagong Suyanto. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syafiie, Inu Kencana. 2015. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara

Wiludjeng, Sri. 2007. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah

Surat Keputusan Bersama Menteri Negara Koperasi & Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Nomor. 04/Kep/M/V/2001 dan 518-162

Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.338.VII/2003 tentang Tim Perintis Persiapan Pembentukan Lembaga Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Riau

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2013 tentang PT. Jamkrida Riau

Jurnal:

Budhisulistiyawati, Ambar dkk., 2015. *Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (Bumd) Persero Untuk Mewujudkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik*, JOM FISIP, Vol. 3 No. 2

Febrianda, Rudi. 2016. *Strategi Pemerintah Dalam Mengurangi Pengangguran Di Kabupaten Siak Tahun 2011-2013*, JOM FISIP, Vol. 3 No. 1.

Hutapea, Benni Olan. 2017. *Strategi Pemerintah Daerah Dalam*

Pengembangan Kawasan Wisata Muara Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015, JOM FISIP, Vol. 4 No. 1.

Mariana, Rina. 2015. *Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kecamatan Sungai Mandau Tahun 2013*, JOM FISIP, Vol. 2 NO. 2.

Sanusi, Wan Trisnazilah. 2017 *Perusahaan Daerah Dan K ya Terhadap Penc ili Daerah (Pad) . . . ten Natuna Tahun 2012-2014*, JOM FISIP, Vol. 4 No. 2

Skripsi:

Ardiana, Fira Rahmatia. 2019. *Strategi Pemerintah Kota Bukittinggi dalam Pengelolaan Sanitasi Perkotaan Tahun 2018*. Universitas Riau: S1 Ilmu Pemerintahan.

Padli, Ronal. 2016. *Strategi Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Melalui Program Desa Maju Inhil Jaya di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Tahun 2015*. Universitas Riau: S1 Ilmu Pemerintahan.

Putra, Rannuh Wijaya. 2015. *Strategi Pemerintah Kota Dumai Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Perusahaan Daerah (PD) Pelabuhan Dumai Bersamai Tahun 2005-2010*. Universitas Riau: Skripsi S1 Ilmu Pemerintahan.

Rahmayuni, Sri. 2017. *Strategi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru Tahun 2013-*

2016. Universitas Riau: S1 Ilmu Pemerintahan.

Septiatuti, Endang. 2017. *Strategi Pemerintah Kabupaten Siak dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2011-2016*. Universitas Riau: S1 Ilmu Pemerintahan.

Internet:

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Provinsi Riau.

<http://bap.riau.go.id/bumd/ptjr>.

Diakses pada 23 April 2019.